

PENGEMBANGAN ASET TERITORIAL SEBAGAI BASIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Oleh : Ahyuni
ahyuniaziz@yahoo.com

Abstrak

Assets-based development is a theoretical approach have been developed for development planning for more optimistic, relying on endogenous development, more innovative and have ability to enhance the capacity and mobilize assets to transform the society. This approach criticized needs-oriented solution in development thinking that is development driven by external resources and more emphasized mapping problem and deficiency on people and place. As consequences, pessimism is growing and so many resources or assets existed or potential in a territory is neglected. This article discussed concept of assets-based planning and compared it with needs-oriented approach. Some examples from Indonesian development planning cases are also described.

Kata kunci : *Perencanaan Pembangunan, pendekatan berbasis pengembangan aset*

I. PENDAHULUAN

Banyak kasus di Indonesia terutama di perdesaan, pembangunan disokong oleh bantuan dari luar desa terutama oleh perantau yang mengirimkan uang ke tanah kelahiran/kampungnya sehingga roda ekonomi desa tersebut bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah tersebut disokong oleh para tenaga kerja yang bekerja luar wilayah yang bersangkutan. Hal senada diceritakan kembali oleh Oleh Friedmann, 2007 sebagai berikut:

Jane Jacob seorang pakar perencanaan pernah menggambarkan

kehidupan sebuah desa bernama Napizaro yang terdapat diperbatasan negara Mexico dengan Amerika Serikat. Dulunya desa tersebut adalah daerah yang miskin tetapi kemudian menjadi makmur (dilihat dari indikator fisik seperti kondisi rumah, adanya lampu jalan dan kelengkapan material lainnya) karena lebih kurang tiga perempat penduduk laki-lakinya bekerja di Amerika Serikat sebagai buruh dan mengirim pendapatan mereka ke kampung. Meskipun demikian sebenarnya kehidupan ekonomi di daerah tersebut sebenarnya tidak banyak berubah, tetap tidak banyak sumber

kehidupan ekonomi di desa tersebut. Sumber kemakmuran hanya berasal dari kiriman rantau (remittance) semata. Yang mengkhawatirkan dalam kasus ini adalah kemakmuran yang sangat bergantung dari faktor luar. Misalnya terjadi perubahan politik dan pekerja tidak lagi bisa bekerja di Amerika Serikat maka desa itu dengan segera akan kembali miskin seperti dulunya.

Dalam kasus tersebut, diukur secara ekonomi (dari segi pendapatan atau pengeluaran), wilayah tersebut dapat dikatakan makmur dan maju. Akan tetapi kemakmuran tersebut bisa dilihat sebagai kemakmuran yang semu karena bisa saja akan berubah setiap saat dan wilayah akan kembali miskin seperti awalnya.

John Friedmann mengatakan bahwa untuk mencapai kemakmuran yang sebenarnya (true wealth), maka perlu didorong pembangunan yang bersumber dari kekuatan di dalam tempat itu sendiri (endogeneous development). Oleh karena itu pembangunan suatu tempat/ruang teritorial (dalam skala kecil lingkungan, kawasan, sampai skala

wilayah) perlu mengembangkan berbagai aset yang ada didalamnya. Pembangunan ini disebut pembangunan yang berbasis pada aset (asset-based development).

Ruang sebagai tempat merupakan sekumpulan orang hidup berkelompok dengan berbagai identitas, budaya dan kepemilikan bersama merupakan suatu teritori. Suatu teritori dengan demikian merupakan suatu kesatuan ruang kehidupan. Mulai dari skala kecil seperti desa atau kampung atau nagari, kemudian kota, provinsi, sampai negara merupakan suatu unit teritorial. Dengan demikian suatu unit teritorial merupakan juga suatu unit sosial dan politik. Pembangunan berbasis aset teritorial merupakan salah satu pendekatan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Unit teritorial sebagai suatu kesatuan ruang hidup dalam berbagai aspeknya yaitu sosial, budaya, politis selain fisik merupakan unit membangun yang menyeluruh, “membangun yang sebenarnya” kalau mengikuti istilah Friedmann seperti dikutip

sebelumnya, yang mampu menggerakkan semua potensi dan inovasi yang mungkin didalam teritori secara berkelanjutan.

Artikel ini mencoba membahas pendekatan aset dalam pembangunan teritorial dan membandingkannya dengan pendekatan yang biasanya dipakai dalam praktek perencanaan di Indonesia dan mengkaji kelebihan dan kekuatannya.

II. PEMBANGUNAN BERBASIS ASET (ASSET-BASED DEVELOPMENT)

Terdapat tujuh aset dalam pembangunan menurut Friedmann, yaitu: manusia, sosial, budaya, intelektual, sumber daya alam, lingkungan dan kualitas sarana prasarana. Lebih lanjut Friedmann merinci tentang aset tersebut.

Aset manusia yaitu manusia dengan kualitas kehidupannya. Kebutuhan dasar penduduk seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan perlu dipenuhi dan menyiapkan penduduk untuk hidup dijamin modern.

Aset sosial adalah masyarakat yang terorganisir dalam bidang agama, ekonomi maupun kegiatan

sosial lainnya yang menjadi sumber kekuatan masyarakat dalam membangun.

Aset budaya berupa kekayaan tradisi budaya maupun situs fisik (heritage) yang menjadi identitas dan spirit masyarakat dalam membangun. Hilangnya aset budaya akan melemahkan kekuatan masyarakat dalam membangun.

Aset intelektual dan kreatifitas dalam bentuk produk pengetahuan, kemampuan ekspresi seni budaya dan produksi.

Aset sumberdaya alam anugerah Tuhan berupa lahan yang subur untuk pertanian, kekayaan mineral, hutan, sumberdaya air, atau keindahan bentang alam perlu dimanfaatkan dan bukannya diabaikan atau malah dieksploitasi secara berlebihan.

Aset lingkungan adalah kualitas lingkungan fisik yang mampu mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.

Aset kualitas sarana prasarana seperti transportasi, energi, komunikasi, air bersih, pembuangan sampah dan limbah perlu disediakan untuk semua lapisan masyarakat.

Seringkali terdapat ketimpangan dalam penyediaan sarana prasarana antara penduduk menengah keatas dan menengah kebawah.

Lebih lanjut, pembangunan dalam pendekatan pengembangan aset teritorial tersebut merupakan upaya untuk membangun wilayah sebagai suatu ruang kehidupan (life space) sebagai suatu lingkup ruang teritorial yang membedakannya dari ruang ekonomi yang lebih didasarkan pada kekuatan pasar dan keuntungan ekonomi (profit) semata (Friedmann, 1988). Pembangunan dalam pengertian ruang kehidupan atau dalam istilah lain disebut ruang sosial memiliki pengertian yang lebih luas dan nyata daripada hanya menekankan aspek ekonomi saja. Pernyataan berikut yang tepat menggambarkan pendekatan ini dapat dikutip dari ungkapan Daoed Joesoef (2011) :berikut

“Pembangunan dalam term ruang sosial bukan dalam dalam term pendapatan (yang diukur melalui indikator ekonomi seperti Pendapatan domestik atau pendapatan nasional).” ...”Ruang sosial bukan suatu substansi abstrak tetapi ruang hidup manusia yang konkrit, yang diciptakan dalam konteks pembangunan komunitas

khusus, lokal atau nasional.” ...”Pembangunan dalam ruang sosial ini diformulasikan sebagai suatu gerakan dari komunitas (lokal atau nasional).”

III.PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS ASET

Dengan pengertian aset sebagai sesuatu yang bernilai, berguna, sumberdaya yang dapat dimanfaatkan, maka aspek lokasional merupakan salah satu aset wilayah yang penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pengembangan kegiatan dan fasilitas ekonomi dan sosial baru dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keunggulan lokasional dari daerah lainnya dan daerah pelayanannya. Tetapi beberapa hal perlu diperhatikan terkait dengan asumsi teori lokasi yang menjelaskan pilihan lokasi seperti yang dijumpai dalam analisis wilayah dalam bidang geografi dan ekonomi regional. Pertama, faktor lokasi lebih bersifat faktor eksogen sehingga bisa dipahami tidak dimasukkan kedalam faktor pembangunan endogen dan paling hanya sebagai faktor yang memberi peluang munculnya faktor endogen. Dalam pengembangan wilayah,

pertimbangan lokasi tidak hanya didasarkan atas lokasi yang paling efisien tetapi lebih utama berdasarkan pertimbangan kepentingan pengembangan wilayah yang lebih luas. Contohnya, pembangunan fasilitas di kawasan perbatasan negara bisa saja lebih banyak berdasarkan pertimbangan politis (untuk alasan kedaulatan dan keamanan) daripada pertimbangan ekonomis.

Untuk menjelaskan pendekatan pembangunan berbasis aset dapat dibuat perbandingan dengan pendekatan berorientasi kepada kebutuhan yang selama ini menjadi pendekatan yang lazim dianut dalam perencanaan. Dengan perbandingan kemudian dapat dilihat kekurangan/kelemahan pendekatan sebelumnya serta kelebihan/kekuatan dari pendekatan yang ditawarkan.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan (needs-oriented solution)

Pendekatan yang biasa dipakai dalam perencanaan wilayah yaitu pendekatan yang fokus kepada aspek memenuhi kebutuhan

berdasarkan masalah yang diidentifikasi (needs-oriented solution). Pendekatan ini disebut juga pendekatan tradisional (McKnight dan Kretzmann, 1996).

Langkah perencanaan dalam pendekatan ini dimulai dari pemetaan masalah yaitu menemukan sesuai yang kurang melalui penemuan masalah dan mengidentifikasi sumberdaya yang bisa mengatasinya. Oleh karena fokus kepada pengamatan masalah maka kecenderungan yang terjadi solusi masalah berasal dari sumberdaya dari luar wilayah. Hal yang wajar terjadi karena dengan fokus kepada pengamatan masalah maka yang terlihat adalah berbagai kekurangan yang bisa diatasi dengan masukan dari luar berupa program pemerintah atau investasi swasta. Langkah mengatasi masalah dalam pendekatan ini dapat dikatakan lebih fokus pada sumber daya luar (externally focus). Upaya mengatasi masalah dengan fokus kepada sumberdaya luar menyebabkan penyelesaian masalah cenderung terpisah-pisah (fragmented).

Kecenderungan perencana dan pengambil keputusan berpikir dalam kerangka ini sedikit banyak dibentuk oleh kecenderungan pendidikan kampus yang mengajarkan pemikiran kritis yaitu melihat berbagai kekurangan dalam suatu hal. Di kampus lazim diajarkan kerangka tahapan perencanaan seperti berikut: mengumpulkan dan menganalisis data tentang masalah dan kebutuhan dan kemudian mengidentifikasi berbagai sumberdaya yang dibutuhkan. Pemikiran seperti ini memang terlihat logis dan objektif dengan menganggap wilayah perlu “ditolong” dengan perencanaan. Dalam pengajaran di kampus pendekatan ini sangat kuat karena sangat logis dan objektif.

Kelemahan dari pendekatan yang fokus kepada pemetaan masalah dan kebutuhan ini yaitu:

Memandang wilayah sebagai suatu daftar masalah dan kebutuhan menyebabkan pemecahan masalah wilayah menjadi terpisah-pisah melalui pertolongan sumber daya luar. Akan tetapi berbagai masalah tersebut bisa saja timbul karena

kapasitas pemecahan masalah dari dalam wilayah sendiri yang masih masih lemah atau tidak teroganisir.

Target pendanaan berdasarkan pemetaan kebutuhan lebih ditujukan kepada penyandang dana daripada masyarakat di wilayah.

Penekanan kepada permasalahan dan kekurangan akan banyak mengabaikan kapasitas dan kekuatan masyarakat serta potensi wilayah.

Pemetaan masalah dan kebutuhan akan menimbulkan persepsi bahwa para ahli luar, pendanaan luar dan investor yang akan dapat menyelamatkan masyarakat atau mengembangkan wilayah.

Ketergantungan kepada perencanaan berdasarkan peta kebutuhan akan menimbulkan siklus ketergantungan kepada pendanaan luar.

Perencanaan berdasarkan peta kebutuhan lebih tepat diterapkan kepada kasus individual bukan kepada perencanaan pembangunan yang melibatkan kapasitas dan energi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan yang negatif menimbulkan perasaan tidak berdaya dan tanpa harapan. Pendekatan ini tidak dapat mengarahkan perubahan yang mendasar kepada masyarakat dan wilayah.

Pendekatan Perencanaan pembangunan Berorientasi kepada pengembangan Aset (Asset-Based Development /Capacity-focused Development)

Alternatif pendekatan perencanaan pembangunan adalah pengembangan kebijakan dan kegiatan yang berdasarkan aset wilayah serta aset, kapasitas, dan ketrampilan masyarakat di wilayah. Pendekatan ini menekankan pengembangan kapasitas berbagai aset yang ada di wilayah. Aset wilayah berupa: aset manusia, aset sosial, aset finansial, aset natural, dan fisik buatan (sarana dan prasarana) dan juga dapat ditambahkan aset budaya yaitu cara pandang masyarakat tentang yang bernilai dan yang dianggap mungkin berubah dan aset politis yaitu kemampuan mempengaruhi pengambilan keputusan publik.

Langkah perencanaan dalam pendekatan perencanaan ini yaitu:

Pertama, menemukenali berbagai aset dalam suatu teritori serta menemukenali berbagai peluang untuk pengembangan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan aset.

Kedua, menyusun strategi perencanaan pembangunan tentang agenda pengembangan aset dan pemecahan masalah untuk pengembangan kapasitas aset secara internal.

Ketiga, Membangun keterhubungan antar berbagai lembaga dan organisasi yang ada didalam wilayah dalam rangka membangun aset dan kapasitas.

Dalam perencanaan pembangunan dengan pendekatan berbasis aset, tetap dibutuhkan sumberdaya luar berupa pendanaan pemerintah, investasi swasta, atau bantuan tenaga ahli maupun LSM untuk membangun wilayah akan tetapi sumber daya luar tersebut dikonversi menjadi bagian investasi untuk pembangunan lokal.

Aset yang digerakkan untuk membangun teritori dalam pendekatan ini dapat dibagi atas:

- a. aset yang berada didalam wilayah dan dikontrol sendiri seperti lahan ulayat, organisasi dan asosiasi masyarakat, dan modal sendiri.
- b. aset yang berada didalam wilayah tetapi dikontrol pihak luar seperti lahan yang dimiliki negara seperti kawasan hutan yang kewenangan pengelolaannya oleh pemerintah, lahan swasta yang telah ada, dan fasilitas pemerintah dan swasta seperti rumah sakit, industri, sarana komersial dan lain sebagainya.
- c. aset dari luar wilayah seperti pendanaan pemerintah dan investasi swasta.

Pembedaan aset ini penting untuk menyusun strategi pembangunan. Strategi pembangun yang diterapkan yaitu dapat memobilisasikan berbagai aset tersebut yang dapat memberi kontribusi membangun kapasitas aset pertama yaitu aset yang dimiliki dan dikontrol masyarakat.

Perbedaan antara pendekatan perencanaan pembangunan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dengan pendekatan perencanaan pembangunan berorientasi kepada pengembangan aset dapat dirumuskan secara ringkas seperti tabel berikut ini.

Tabel 1: Perbedaan Pendekatan Perencanaan Berbasis Kebutuhan dengan Berbasis Pengembangan Aset

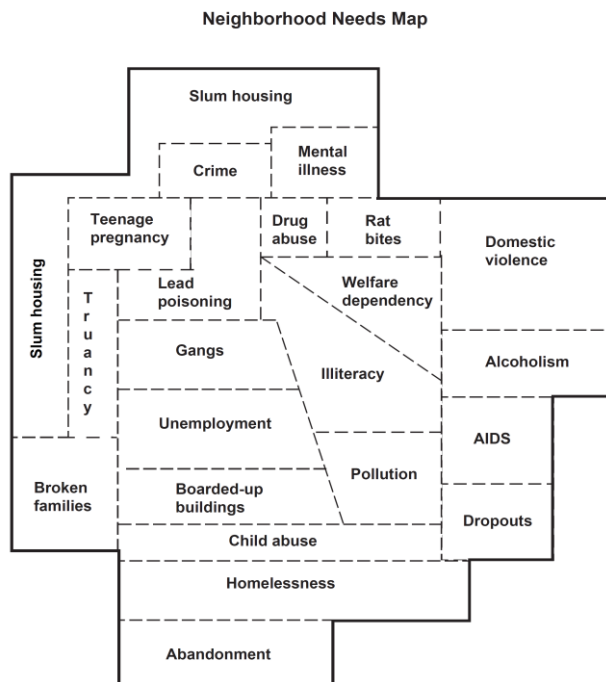
spek	Pendekatan Berbasis Pemenuhan Kebutuhan	Pendekatan Berbasis Pengembangan Aset
Fokus	Fokus kepada pemetaan masalah/defisiensi serta program dan kebijakan untuk mengatasinya	Fokus kepada peluang pengembangan (mobilisasi) aset dan kapasitas teritori.
	menemukan apa yang tidak ada (negatif).	menemukan apa yang ada (positif).
	Sumber perbaikan dari luar (fokus eksternal).	Sumber peningkatan dari dalam (fokus internal).
Metoda	Survei kebutuhan (<i>needs survey</i>), menemukan masalah (<i>problem inventory</i>), dan pemetaan kebutuhan (<i>needs mapping</i>).	Menemukan kapasitas dan aset (<i>asset mapping and capacity inventory</i>).
Strategi perencanaan	Kecenderungan utama mencari sumber solusi (program, investasi) dari luar untuk menjawab masalah dan kebutuhan.	Membangun aset dan kapasitas yang ada didalam wilayah, membangun susunan, kombinasi atau struktur aset baru, mencari peluang pengembangan aset baru.
	Upaya menghilangkan masalah tetapi cenderung sebatas membuat kondisi tidak menjadi semakin buruk (<i>survival</i>).	Membuat perubahan dari dalam yang berkelanjutan.

Sumber: diolah dari Mc Knight dan Kretzmann (1993, 1996)

Dalam metoda pemetaan kondisi sebagai titik tolak untuk menyusun strategi perencanaan terdapat perbedaan yang jelas antara pemetaan kebutuhan (*needs map*) dengan pemetaan aset (*assets map*).

Dalam kasus yang pernah distudi pada lingkungan kumuh (Mc Knight dan Kretzmann (1996), dalam pemetaan kebutuhan yang berasal dari survei kebutuhan menyangkut berbagai masalah dan

kekurangan yang terdapat dilingkungan, diperoleh berbagai daftar permasalahan atau kekurangan yang terdapat di kawasan seperti kriminalitas, pengangguran, penyakit mental, penyakit AIDS, kehamilan diluar nikah, keluarga yang berantakan dan berbagai hal negatif lainnya yang sering dijumpai pada lingkungan kumuh (pemetaan kebutuhan lingkungan seperti terlihat pada gambar 1).

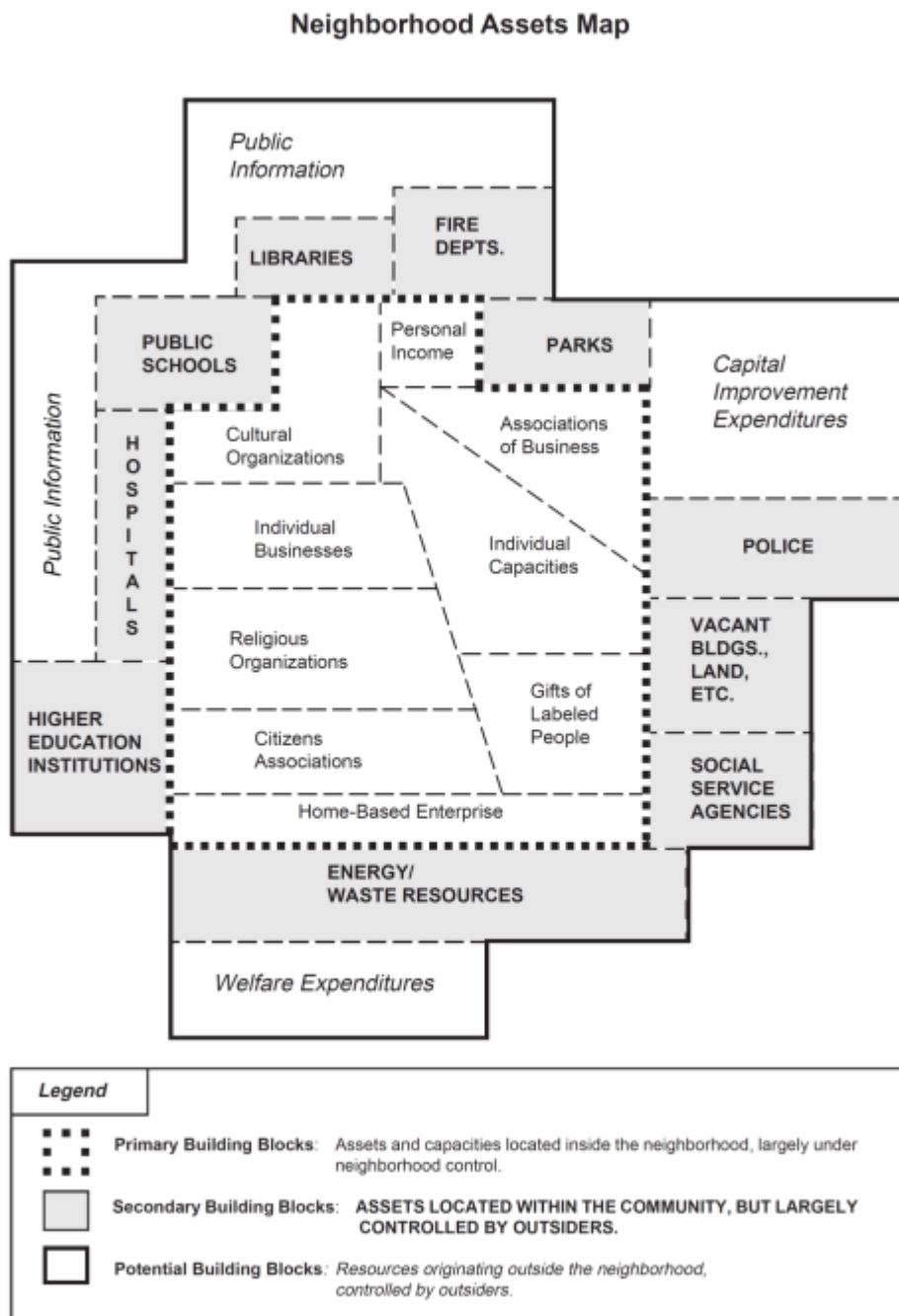


Gambar 1: Contoh Pemetaan Kebutuhan Lingkungan (Neighbourhood Needs Map) Sumber: Mc Knight dan Kretzmann (1996)

Sementara berdasarkan pendekatan aset, dipetakan berbagai kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat kawasan kumuh untuk lebih baik. Dalam pemetaan tersebut tergambar berbagai aset yang bisa digerakkan untuk membangun masyarakat dan lingkungan. Berbagai organisasi budaya, usaha ekonomi, kemampuan dan bakat perorangan yang ada, bahkan pendapatan pribadi meskipun terbatas menjadi aset dalam lingkungan yang berada dibawah kontrol lingkungan yang

potensial untuk digerakkan. Sementara berbagai sarana pendidikan, kesehatan, keamanan, pengolahan limbah dan energi, bangunan dan tanah kosong menjadi aset yang berada dalam lingkungan yang bisa dimanfaatkan tetapi kontrolnya bukan oleh masyarakat. Aset luar yang bisa dimanfaatkan seperti dana program kesejahteraan, dana program perbaikan lingkungan dan informasi publik. Perbedaan berbagai aset ini kelihatannya perlu untuk mengidentifikasi berbagai strategi untuk mempengaruhi

kebijakan publik dalam yang mungkin (pemetaan aset memanfaatkan aset yang berada lingkungan seperti terlihat pada diluar kontrol lingkungan dengan gambar 2). memanfaatkan berbagai aset politik



Gambar 2: Contoh Pemetaan Aset Lingkungan (Neighbourhood Assets Map)
 Sumber: Mc Knight dan Kretzmann (1996)

Dari pemetaan lingkungan berdasarkan dua pendekatan tersebut terlihat perbedaan nyata. Pemetaan kebutuhan mencari berbagai hal negatif yang perlu ditangani. Semakin besar masalah dan kekurangan yang dihadapi maka semakin dibutuhkan berbagai program bantuan untuk menolong lingkungan. Gambaran masyarakat dan lingkungan terlihat suram dan gambaran ketergantungan terhadap bantuan luar juga sangat besar. Sedangkan pada pemetaan aset diperlihatkan berbagai potensi individu, kelompok, kelembagaan dan fisik yang bisa digerakkan untuk membuat perubahan. Gambaran masyarakat dan lingkungan menjadi cerah dan optimis. Berbagai peluang untuk menjalin hubungan aset untuk perbaikan menjadi tampak.

IV. BEBERAPA KASUS PERENCANAAN ASET PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Berikut akan disampaikan beberapa kasus sebagai contoh pengembangan aset wilayah yang memberi dampak luas terhadap perkembangan wilayah secara keseluruhan. Berikut dipaparkan beberapa pengembangan aset yang spesifik oleh daerah

(semua kecuali kasus Kota Bandung bersumber dari Majalah Tempo 16 Desember 2012 dengan topik utama Tujuh Kepala Daerah Pilihan).

a. Aset heritage tambang Kota Sawahlunto

Sawahlunto merupakan kota tambang batu bara yang dibangun pada tahun 1888 di zaman pemerintahan Belanda. Kota kecil dengan penduduk umumnya pegawai dan pekerja tambang. Dengan berkurangnya bahan tambang, kota ini terancam menjadi kota hantu (*ghost town*) seperti umumnya terjadi pada kota-kota berbasis ekonomi tambang yang kemudian ditinggalkan. Lokasi kota juga kurang mendukung untuk menjadikan kota ini sebagai kota perdagangan. Akan tetapi kota ini ternyata mampu memanfaatkan aset heritage yang ada untuk pengembangan pariwisata berbasis pertambangan. Pemerintah Daerah dengan masyarakat merehabilitasi aset bangunan historis yang ada.

b. Aset prasarana Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan

Kabupaten Enrekang merupakan Kabupaten yang miskin dan

terbelakang. Dengan kondisi geografis permukiman terpencar di lebih sepuluh gunung, hanya 8 % tanah datar, 7% landai dan sisanya curam. Strategi pembangunan yang ditetapkan adalah mengalokasikan 30% anggaran membangun jalan beton untuk meningkatkan akses. Hasilnya setelah 2 periode pembangunan ekonomi pertanian mulai tumbuh. Pemerintah Daerah menyediakan truk untuk membawa hasil bumi ke pasar secara gratis. Kekurangan energi listrik dicoba diatasi dengan membuat pembangkit tenaga air mikrohidro dan pembangkit matahari. Permasalahan kesehatan dan pendidikanpun bisa diatasi mengikuti kalau akses transportasi bisa dibuka. Fokus pada pengembangan aset prasarana transportasi menjadi solusi untuk meningkatkan kemakmuran. Dalam kasus ini pemerintah memanfaatkan aset keuangan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk menggerakkan aset potensi pertanian.

c. Aset sosial dan budaya Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang memiliki masalah sosial berupa tawuran, kerusuhan dan kriminalitas yang cukup tinggi pada tahun 2004-2010 dan kerusakan lingkungan karena alih fungsi lahan hutan Kawasan Dieng untuk kebun kentang. Sejumlah 138 dari 582 mata air mati. Solusi sosial yang dilakukan daerah yaitu dengan memanfaatkan aset budaya. Bupati merangkul preman dan melibatkan preman dalam kegiatan keagamaan dan tradisional. Selain itu mengembangkan petani konservasi dan menerapkan kurikulum penyelamatan lingkungan di sekolah menjadi kekuatan untuk membangun kedepan. Dalam kasus ini pemerintah daerah berhasil menggerakkan aset sosial dan budaya.

d. Aset manusia dan sosial Kota Banjar

Kota Banjar fokus pada peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Pemerintah kota memberi bantuan pendidikan bagi warga yang tidak mampu dan membebaskan layanan Puskesmas dan membangun

pos kesehatan desa di setiap desa dan kelurahan. Selain itu pemerintah kota memberi sumbangan modal bergulir kepada koperasi jemaah masjid dan program 1 Milyar 1 desa. Sepertiganya untuk mendirikan badan usaha milik desa. Kegiatan ini berkembang dari simpan pinjam ke kredit konsumtif, jasa dan perdagangan. Ada badan usaha yang maju sehingga bisa berekspansi keluar daerah. Pendapatan Kota Banjar meningkat dari sebelumnya hanya Rp. 3 Milyar menjadi Rp. 41 Milyar. Majalah Tempo menyebutnya kota kecil yang dibangkitkan menjadi pusat pertumbuhan. Dalam kasus ini aset sosial dan manusia menjadi dasar untuk membangun ekonomi.

e. Aset intelektual dan kreatifitas Kota Bandung

Kota Bandung terkenal memiliki produk kreatif dalam industri fashion yang tampil dalam bentuk bisnis Factory Outlet, Clothing Company, sampai Distribution Store dengan jumlah mencapai puluhan dengan perputaran uang yang dapat dikatakan besar. Selain fashion juga dihasilkan berbagai produk seni dan

kuliner. Pengunjung pembeli produk bukan hanya datang dari Indonesia tetapi juga dari negara tetangga. Untuk itu pernah dibuka penerbangan langsung dari Kuala Lumpur – Bandung. Selain itu kota Bandung juga menjadi kota pendidikan terutama dalam bidang teknologi dan seni. Banyak lembaga terkait sains dan teknologi berada di kota Bandung. Pengembangan basis ekonomi kota dari ekonomi kreatif seperti produk kreatif fashion, produk seni, kuliner dan juga kreatifitas keilmuan dan intelektual berpotensi besar untuk berkembang (sumber:

<http://www.tempo.co/read/news/2013>

).

Implikasi Perencanaan

Saat ini sistem perencanaan pembangunan diatur melalui Undang-Undang No 25 tahun 2004 yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berlaku selama 20 tahun yang selanjutnya diterjemahkan kedalam rencana jangka menengah (RPJM) 5 tahunan yang selanjutnya diterjemahkan lagi kedalam rencana tahunan (Ahyuni,

2011). Aturan yang lebih operasional mengenai langkah penyusunan rencana jangka panjang dan menengah dalam perencanaan pembangunan di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 26 dan 27 serta pasal 58 dan 59 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa langkah penyusunan perencanaan yaitu: (1) menganalisis gambaran umum kondisi daerah, (2) merumuskan permasalahan pembangunan daerah, (3) menganalisis isu-isu strategis pembangunan, (4) merumuskan visi dan misi, dan (5) merumusan arah kebijakan.

Aspek yang dikaji yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang ditampilkan dalam berbagai indikator kesejahteraan, aspek pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam berbagai indikator, aspek pelayanan oleh berbagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam bentuk berbagai kinerja pencapaian, dan aspek fisik dalam bentuk berbagai potensi daerah dan kerawanan bencana.

Dari langkah penyusunan rencana beserta aspek yang dikaji tersebut terlihat bahwa pendekatan yang dipakai dalam penyusunan rencana pembangunan lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan (*needs-oriented solution*). Hal ini terlihat dari tahapan merumuskan masalah pembangunan berdasarkan indikator pembangunan. Isu strategis yang dirumuskan selanjutnya banyak dikaitkan dengan berbagai indikator pembangunan yang bermasalah.

Dengan pendekatan pengembangan aset, perbedaannya pada tahap pertama yaitu mengidentifikasi berbagai aset yang bisa digerakkan untuk mengembangkan daerah. Untuk itu tahapan pertama yang dibutuhkan adalah menyatakan terlebih dahulu nilai yang perlu ditegakkan dalam pembangunan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi berbagai aset yang mungkin. Contohnya, identifikasi

aset lahan tanah ulayat yang bisa dimanfaatkan baru terlihat kalau nilai pembangunan menegaskan pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Usulan yang ditawarkan untuk tahapan perencanaan pembangunan dengan pendekatan pengembangan aset, yaitu:

(1) Penegasan nilai yang ingin ditegakkan dalam perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dalam memandang wilayah dan mencari pilihan strategi solusi.

(2) Merumuskan Berbagai aset daerah eksisting maupun potensial.

(3) Merumuskan berbagai peluang pengembangan aset daerah.

(4) Menganalisis isu-isu strategis terkait upaya menjalin hubungan antara berbagai instansi, lembaga, asosiasi, dan organisasi dalam rangka menggerakkan berbagai aset.

(5) Merumuskan visi dan misi/agenda pembangunan

(6) Merumuskan kebijakan operasional dalam rangka mengembangkan aset.

Daftar Rujukan

Ahyuni, (2011), *Pemaduan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan*, Tingkap, Volume VII, Halaman 133-145, Oktober 2011

Friedman, John, (2007), *The Wealth of Cities: Towards an Assets-based Development of Newly Urbanizing Regions*, Development and Change, Volume 38, Issue 6, pages 987–998, November 2007.

Friedman, John, (1988), *Life Space And Economic Space : Essays In Third World Planning*, New Brunswick, N.J. : Transaction Books.

Joesoef, Daoed, (2002), *Dia dan Aku (dalam: Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, editor Sri-Edi Swasono)*, Yayasan Hatta: Jakarta

Kretzmann, John P., dan McKnight, John L., (1996), *Mapping Community Capacity (revisited)*, Institute for Policy Research, Northwestern University.

Kretzmann, John P., dan McKnight, John L., (1993), Pengantar buku *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*, Evanston, IL: Institute for Policy Research.

Majalah Tempo 16 Desember 2012 dengan topik utama Tujuh Kepala Daerah Pilihan, hlm. 36-82.

Peraturan Menteri dalam Negeri RI No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/03/114502138/Empat-Kota-Indonesia-Kandidat-Kota-Kreatif-Unesco>.